



# RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

---



BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## LEMBAR PENGESAHAN

Rencana Aksi Kinerja  
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan  
Tahun 2023

Dibuat dan disusun untuk dipedomani  
Oleh seluruh koordinator/penanggung jawab dan pelaksana kegiatan  
DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan T.A. 2023

Yogyakarta, Januari 2023

Dibuat dan disusun oleh:  
Kepala Bagian Umum,



Henri Supriyanto, S.Hut.T., M.A.P  
NIP. 19730823 199301 1 002

Mengetahui/Menyetujui:  
Kepala Balai Besar,



Dwi Prabowo Yuga Suseno, S.Si., M.Sc., Ph.D  
NIP. 19751104 200112 1 002

## **RENCANA AKSI KINERJA**

Rencana Aksi Kinerja merupakan rencana implementasi dari beberapa dokumen perencanaan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK) Tahun 2023 yaitu Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL), Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK).

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kinerja adalah:

1. Menyediakan pedoman/acuan untuk koordinator/penanggung jawab dan pelaksana kegiatan lingkup BBPSIK;
2. Tolok ukur untuk melaksanakan evaluasi kinerja aparatur maupun kinerja BBPSIK.

Adapun dokumen perencanaan lain seperti Renja adalah sebagai acuan untuk penyusunan rencana kegiatan pada RKA-KL, sedangkan Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta
4. Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK) telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Januari 2023. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, BBPSIK telah membuat perjanjian kinerja secara berjenjang melalui penyusunan masing-masing Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai target baik kualitas maupun kuantitasnya maka disusunlah Rencana Aksi Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK). Diharapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023

menjadi acuan bagi seluruh komponen lingkup BBPSIK dalam menjalankan aktivitasnya.

**Perjanjian Kinerja (PK) Antara Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK dengan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Tahun 2023**

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatkan Kualitas Standar Instrumen (Skema, Sistem, Prosedur dan Standar) Usaha dan Produk dalam Perijinan Berusaha Bidang Kehutanan	Jumlah Unit Usaha yang Dikendalikan	2 Lembaga 2 Produk
2.	Menyiapkan Standardisasi Usaha dan Produk yang Berkualitas dalam Perijinan Berusaha Bidang Kehutanan	Jumlah Standar Usaha/Produk Bidang Kehutanan	6 Unit
3.	Meningkatkan Kualitas Standar Instrumen (Skema, Sistem, Prosedur dan Standar) Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Jumlah Unit Usaha yang Dikendalikan	1 Lembaga 1 Produk
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Akuntabel, Responsive dan Berpelayanan Prima	Nilai SAKIP Badan Standardisasi Instrumen LHK (78 poin)	2 Layanan

**Aktivitas:**

**Anggaran (x Rp. 1.000)  
Rp.16.098.072**

029.07.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
6761	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
6761.ADA	Standardisasi Produk
6761.ADA.051	Standar Produk yang Diterapkan Melalui Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
051	Pengendalian, Penilaian, Pengujian dan Validasi Standar Produk, Sistem dan Prosedur, dan Uji Pelaksanaan Standar Instrumen Produk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
6761.ADD	Standardisasi Lembaga
6761.ADD.051	Standar Usaha yang Diterapkan Melalui Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
051	Pengendalian, Penilaian, Pengujian dan Validasi Standar Lembaga Pelaksana Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

6761.CDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan
6761.CDK.051	KHDTK Sebagai Laboratorium Lapangan
051	Pengelolaan KHDTK
029.07.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
6762	Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
6762.PFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
6762.PFA.051	Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
053	Perumusan
029.07.WA	Program Dukungan Manajemen
6758	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
6758.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
6758.EBA.962	Layanan Umum
051	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
052	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Anggaran
053	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
054	Administrasi Keuangan
055	Administrasi Tata Usaha Rumah Tangga dan BMN
056	Administrasi Kerjasama Teknik
057	Pelaksanaan Urusan Kepegawaian
058	Pengelolaan Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat
6758.EBA.994	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

### Rencana Aksi Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Target Tahunan		Target Progres Per Triwulan (%)				Bentuk Output	Lokasi	Penanggung Jawab
		Vol	Satuan	I	II	III	IV			
Meningkatkan Kualitas Standar Instrumen (Skema, Sistem, Prosedur dan Standar) Usaha dan Produk dalam Perijinan Berusaha Bidang Kehutanan	Jumlah Unit Usaha yang Dikendalikan	2	Lembaga							
	Pengendalian, penilaian, pengujian dan validasi standar produk, sistem dan prosedur, dan uji pelaksanaan standar instrumen produk pengelolaan hutan berkelanjutan	2	Produk	15	35	75	100	Laporan	Seluruh Wilayah Indonesia	Bidang Pengujian dan Validasi Standar Instrumen
	Pengendalian, penilaian, pengujian dan validasi standar lembaga pelaksana standar instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan	2	Lembaga	15	35	75	100	Laporan	Seluruh Wilayah Indonesia	Bidang Pengujian dan Validasi Metode Verifikasi Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen
Menyiapkan Standardisasi Usaha dan Produk yang Berkualitas dalam Perijinan Berusaha Bidang Kehutanan	Jumlah Standar Usaha/Produk Bidang Kehutanan	6	Unit							
	Pengelolaan KHDTK	6	Unit	20	50	80	100	Laporan	Sleman, Gunungkidul, Wonogiri, Situbondo, Bondowoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengujian dan Validasi Standar Instrumen</li> <li>- Bidang Pengujian dan Validasi Metode Verifikasi Penilaian Kesesuaian</li> </ul>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Target Tahunan		Target Progres Per Triwulan (%)				Bentuk Output	Lokasi	Penanggung Jawab
		Vol	Satuan	I	II	III	IV			
										Standar Instrumen
Menyiapkan Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Jumlah Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	NSPK							
	Perumusan	1	NSPK	15	35	75	100	Laporan	Seluruh Wilayah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengujian dan Validasi Standar Instrumen</li> <li>- Bidang Pengujian dan Validasi Metode Verifikasi Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen</li> </ul>
Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Akuntabel, Responsive dan Berpelayanan Prima	Nilai SAKIP Badan Standardisasi Instrumen LHK (78 poin)	2	Layanan							
	<b>1. Layanan Umum</b>									
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	1	Dokumen	25	50	80	100	Dokumen Perencanaan (Renja, TOR)	Sleman, Yogyakarta	Kepala Bagian Umum
	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Anggaran	1	Dokumen	20	50	75	100	Dokumen Anggaran (RAB, DIPA, RKA/KL)	Sleman, Yogyakarta	Kepala Bagian Umum
	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	1	Laporan	20	50	80	100	Laporan	Sleman, Yogyakarta	Kepala Bagian Umum
	Administrasi Keuangan	1	Laporan	25	50	75	100	Laporan	Sleman, Yogyakarta	Kepala Bagian Umum



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Target Tahunan		Target Progres Per Triwulan (%)				Bentuk Output	Lokasi	Penanggung Jawab
		Vol	Satuan	I	II	III	IV			
	Administrasi Tata Usaha Rumah Tangga dan BMN	1	Laporan	25	50	75	100	Laporan	Sleman, Yogyakarta	Kepala Bagian Umum
	Administrasi Kerjasama Teknik	1	Laporan	25	50	75	100	Laporan	Sleman, Yogyakarta	Kepala Bagian Umum
	Pelaksanaan Urusan Kepegawaian	1	Laporan	25	50	75	100	Laporan	Sleman, Yogyakarta	Kepala Bagian Umum
	Pengelolaan Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat	1	Laporan	25	50	75	100	Laporan	Sleman, Yogyakarta	Kepala Bagian Umum
	<b>2. Layanan Perkantoran</b>									
	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	25	50	75	100	Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Sleman, Yogyakarta	Kepala Bagian Umum
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	20	40	70	100	Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Sleman, Yogyakarta	Kepala Bagian Umum

## PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK) adalah rencana implementasi pelaksanaan aksi kegiatan dengan didasari dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Strategis (Renstra) BBPSIK Tahun 2022-2024, Rencana Kerja (Renja) BBPSIK Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2023 yang telah disusun sebelumnya.

Rencana Aksi Kinerja BBPSIK merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan selama periode satu tahun dan dirinci setiap triwulan beserta target-target yang harus dicapai setiap periode triwulan tersebut. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk pengukuran dan evaluasi rencana aksi pada akhir tahun kegiatan yang mencakup capaian target, bentuk output dan lokasi kegiatan.

Pencapaian target sesuai rencana aksi kegiatan dapat terlaksana dengan baik jika seluruh komponen dalam unit kerja BBPSIK mendukung pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada dokumen ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan pencapaian target kegiatan sangat diharapkan agar tujuan kegiatan dapat tercapai. Penyesuaian terhadap Rencana Aksi Kinerja dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.